

PENGARUH OTONOMI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Nando Ferdiansyah

NPP. 32.1071

Asdaf Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email : ferdiansyahnando2009@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Drs. Suaib, M.Si

ABSTRACT

Jayapura Regency is one of the regencies in Papua that implements Special Autonomy. In this case, Jayapura Regency utilizes revenue sources in the form of Special Autonomy Funds, PAD and DAU as widely as possible in order to achieve equitable economic development with indicators in the form of positive economic growth. According to Wagner's Law Theory, the greater the food expenditure, the better the economic conditions of a region. However, the reality is that economic growth in Jayapura Regency is still not optimal, the poverty rate is 11.45%, the constant price GRDP is still fluctuating and infrastructure development is still uneven. This study was conducted to determine whether or not there is an influence of revenue sources in Jayapura Regency on economic growth in Jayapura Regency. This study uses a descriptive quantitative method using multiple linear regression analysis with 4 variables; Special Autonomy Funds (X1), PAD (X2), and DAU (X3) and Economic Growth with the indicator of Constant Price GRDP (Y). This study uses secondary data with a collection technique using a purposive sampling technique with data criteria in the form of the amount of funds for the four variables in 2015-2024. It was found that the results of the Special Autonomy Fund test value $(X1) = 161 > \alpha = 5\%$, PAD $(X2) 0.036 < \alpha = 5\%$, and DAU $(X3) = 0.026 < \alpha = 5\%$. The conclusion is that X1 does not have a significant effect on Y while X2 and X3 have a significant effect on Y.

Keywords : *Special Autonomy, Economic Growth, Special Autonomy Funds, Locally-Generated Revenue, General Allocation Funds*

ABSTRAK

Latar Belakang. Kabupaten Jayapura merupakan salah satu Kabupaten di Papua yang melaksanakan Otonomi Khusus. Dalam hal ini kabupaten jayapura melakukan pemanfaatan sumber penerimaan berupa Dana Otsus, PAD dan DAU dengan seluas-luasnya dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang merata dengan indikatornya berupa pertumbuhan ekonomi yang positif. Menurut Teori Hukum Wagner semakin besar pengeluaran maka semakin baik pula kondisi ekonomi suatu wilayah. Namun, realitanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura masih belum maksimal angka kemiskinan 11,45%, PDRB harga konstan yang masih fluktuatif dan pembangunan infrastruktur yang masih belum merata. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh sumber penerimaan di Kabupaten Jayapura terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten jayapura. **Metode.** Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 4 variabel ; Dana Otsus (X₁), PAD (X₂), dan DAU(X₃) dan Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator PDRB Harga Konstan (Y). penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria data berupa besaran jumlah dana keempat variabel pada tahun 2015-2024. **Hasil.** temuan menunjukkan nilai

uji Dana Otsus (X_1) = 161 > α = 5%, PAD (X_2) 0.036 < α = 5%, dan DAU (X_3) = 0.026 < α = 5%.
Kesimpulan. X_1 Tidak berpengaruh signifikan terhadap Y sedangkan X_2 dan X_3 berpengaruh signifikan terhadap Y

Kata Kunci : Otonomi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Otonomi Khusus, PAD, DAU

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, termasuk didalamnya Kabupaten Jayapura yang menjadi bagian dari Provinsi Papua itu sendiri, merupakan kebijakan desentralisasi asimetris yang diterapkan pemerintah Indonesia sejak tahun 2001 dengan dasar pelaksanaannya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi-Provinsi Papua. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, termasuk di- Kabupaten Jayapura, melalui pemberian kewenangan yang lebih luas- dalam pengelolaan sumber penerimaan dari pusat kepada provinsi Papua dan kabupaten/kota di Papua.

Solow, (1956)"Pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu wilayah sangat ditentukan oleh alokasi sumber daya dan investasi modal yang berkelanjutan. Dalam konteks desentralisasi fiskal, Dana Otonomi Khusus dapat menjadi katalisator pertumbuhan jika dimanfaatkan untuk investasi produktif.". Namun pengelolaan sumber penerimaan di Kabupaten Jayapura khususnya Dana Otsus, PAD dan DAU masih belum maksimal dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Jayapura. Laporan BPS Papua menunjukan masih kurang maksimalnya pembangunan infrastruktur di kabupaten Jayapura seperti fasilitas kesehatan, pendidikan maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya. Kurangnya fasilitas mempengaruhi aktivitas ekonomi di Kabupaten Jayapura yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura yang ditunjukan dengan angka kemiskinan sebesar 11,45% angka ini masih lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional yang berada pada angka 9,3% (BPS-Statistics Indonesia, 2023).

Selama kurang lebih 23 tahun melaksanakan otonomi khusus semenjak tahun 2001. Pengaruh penerimaan otonomi khusus di Kabupaten Jayapura belum berdampak signifikan khususnya terhadap pertumbuhan-ekonominya yang diukur berdasarkan PDRB harga konstan bila dibandingkan dengan besarnya jumlah penerimaan dana yang dialokasikan setiap tahunnya di Kabupaten Jayapura. Meskipun terdapat peningkatan absolut dalam indikator ekonomi di Kabupaten Jayapura sejak implementasi Otonomi Khusus, pertumbuhan relatif dibandingkan dengan kabupaten lain di Indonesia masih tertinggal. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan Otsus memerlukan reformasi untuk lebih efektif mengatasi hambatan struktural dalam ekonomi local. Adanya PAD dan DAU ditambah Dengan pemberian Dana Otsus rata-rata sebesar 66,2 milyar rupiah tiap tahunnya masih belum mampu memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura dimana pada tahun 2015 angka pertumbuhan ekonomi berada di 9%, lalu turun dan mengalami stagnan di tahun 2016-2019 pada angka 7%. Persentase pertumbuhan mengalami penurunan yang lebih drastis hingga -2,5% di tahun 2020. Ditahun berikutnya pertumbuhan ekonomi ini masih mengalami fluktuatif sempat meningkat menjadi 2,4% di tahun 2023 namun turun lagi menjadi 1,65% di tahun 2024 (Rumbiak, W., 2021).

Hubungan antara Dana Otonomi Khusus, PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui Teori Pengeluaran Pemerintah, yang dikenal juga sebagai Hukum Wagner. Teori ini menyatakan bahwa "peningkatan pengeluaran pemerintah berbanding lurus dengan peningkatan aktivitas perekonomian suatu negara". Dengan demikian, alokasi Dana OTSUS untuk Kabupaten Jayapura dalam meningkatkan penegeluaran selain DAU dan PAD yang tepat sasaran diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **“Pengaruh Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua”**. Terkhusus dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan mengkaji hubungan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas Dana OTSUS dalam konteks lokal Kabupaten Jayapura, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi penggunaan Dana OTSUS dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa masalah terkait dengan pengaruh otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi yang kita kenal melalui buku teks selalu menyebut tiga modal yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan suatu wilayah yaitu: modal alam, modal fisik (uang dan bangunan), dan modal manusia. Dalam hal ini melalui pemanfaatan sumber penerimaan berupa ; Dana Otsus, PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui PDRB Harga Konstan menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang diteliti besarnya dana yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura nayatanya belum mammpu dimanfaatkan dengan baik. Keberhasilan pemanfaatan sumber penerimaan Otonomi Khusus erat kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal (Suaib, 2023).

Teori Pengeluaran Pemerintah, yang dikenal juga sebagai Hukum Wagner. Teori ini menyatakan bahwa “peningkatan pengeluaran pemerintah berbanding lurus dengan peningkatan aktivitas perekonomian suatu negara”. Dengan adanya penerimaan yang lebih disbanding daerah lain seharusnya Kabupaten Jayapura mampu berkembang dengan lebih cepat. Namun realita yang terjadi dalam 20 tahun menerima Otonomi Khusus Angka kemiskinan masih cukup tinggi sebesar 11,45% yang masih lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional, Pertumbuhan Ekonomi yang fluktuatif, dan infrastruktur yang masih belum merata di Kabupaten Jayapura. Data longitudinal dari 2002 hingga 2021 menunjukkan bahwa transfer fiskal melalui mekanisme Otonomi Khusus telah meningkatkan kapasitas anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura secara substantial. Namun, transformasi kapasitas fiskal ini menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan masih terhambat oleh kelemahan dalam tata kelola dan kapasitas kelembagaan (Weingast, 2009).

Adanya Otonomi Khusus sebagai bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keluasaan pemanfaatan sumber penerimaan seluas-luasnyapun nyatanya masih belum begitu berhasil jika dikaitkan dengan kondisi diatas.

1.3 Penelitian Terdahulu

Jurnal yang ditulis oleh Nurul Arbila, Dkk, (2022) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. Penelitian ini menganalisis variabel berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang didapat melalui observasi laporan dari- Dinas Pendapatan Kabupaten Simalungun, jurnal, Laporan Tahunan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simalungun. Variabel tersebut dimasukan dalam uji data untuk mendapatkan hasil yang ingin dicari. Adapun hasil dari penelitian ini ; 1). PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan 3) DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil itu disimpulkan penulis jurnal ini bahwa PAD, DAU, dan DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya ialah pada variable x berupa dana yang digunakan pada penelitian ini dana otonomi khusus, PAD dan DAU sedangkan

penelitian sebelumnya PAD, DAU dan DAK. Selain itu, lokasi penelitian yang berbeda (Nurul Arbila et al., 2022).

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Boky, (2023) yang berjudul Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana otonomi khusus, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan menggunakan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat. Dengan menggunakan regresi data panel penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa dana otonomi khusus dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah lokasi, tujuan penelitian dan variabel x terhadap y , yaitu variabel x nya disamping otonomi khusus juga menggunakan dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat (variabel y) (Boky, 2023).

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Panggabean, Dkk (2022) yang berjudul tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan provinsi, direjen perimbangan kementerian keuangan dan BPS Provinsi Papua. Adapun variabel dalam penelitian ini antara lain Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemiskinan. Adapun Pertumbuhan Ekonomi bertindak sebagai variabel intervening/mediasi dalam penelitian ini. Lalu diolah dengan teknik analisis data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sementara itu Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Perbedaannya kedua penelitian ini ialah pada lokasi, penelitian terdahulu lokusnya lebih luas karena berada pada tingkat provinsi. Perbedaan lainnya ialah pada pengaruh variabel x yang digunakan (dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus (Panggabean et al., 2022).

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Murdaya & Syahril, (2022) yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simeulue. Yang bertujuan menganalisis pengaruh dari dana tersebut atas tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simeule. Dengan menggunakan metode kuantitatif, menggunakan sampel jenuh berupa seluruh populasi menjadi sampel penelitian yang diuji dengan regresi linear berganda menghasilkan kesimpulan bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan kedua penelitian ini ialah pada variabel x yang diteliti (Murdaya & Syahril, 2022).

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Kharisma, Dkk (2020) yang berjudul Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan manusia di Provinsi Papua. Jurnal ini bertujuan menilai dampak yang diberikan dana OTSUS Provinsi Papua yang dialokasikan secara spesifik dalam bidang pendidikan dan kesehatan dalam peningkatan indeks pembangunan manusia di Papua. Adapun variabel yang digunakan berupa : IPM, PDRB per kapita, alokasi dan OTSUS dalam bidang kesehatan dan alokasi dan OTSUS dalam bidang pendidikan dan tingkat kemiskinan yang diolah menggunakan data panel. Hasilnya ialah Dana Otonomi Khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Tahun 2014-2017. Perbedaan kedua penelitian ini ialah penelitian ini fokus menganalisis

kebijakan alokasi dana OTSUS pada bidang pendidikan dan kesehatan serta lokasi penelitian yang berada di tingkat provinsi (Kharisma et al., 2020).

Jurnal Ilmiah yang diteliti oleh Prabowo, Dkk, (2020) yang berjudul *The Influence of the Special Autonomy Policy of the Papua Province on the Welfare of its People*. Menunjukkan bahwa karakteristik otonomi khusus Provinsi Papua identik dengan karakteristik model desentralisasi asimetris yang belum mengarah pada keberhasilan dan belum menunjukkan hal-hal yang mengarah pada efektivitas yang lebih baik. Hal ini dapat berdampak pada kegagalan otonomi khusus Provinsi Papua jika tidak dilakukan evaluasi. Penelitian ini membahas tentang evaluasi kebijakan otonomi khusus yang dilaksanakan di Provinsi Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua. Otonomi khusus merupakan bagian dari otonomi daerah yang bersifat khusus (Prabowo et al., 2021).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda yang belum dilakukan oleh peneliti terdahulu dimana konteks pengaruh otonomi khusus terfokus pada pengaruh pemanfaatan sumber penerima berupa Dana Otsus, PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator PDRB Harga Konstan. Dimana hasil yang didapati dijelaskan secara dekriptif sehingga dapat lebih dipahami factor-faktor yang mempengaruhi hasil uji. Perbedaan variable yang diuji dalam penelitian ini juga memberikan hasil yang lebih maksimal dimana variable yang digunakan berpengaruh terhadap PDRB di Kab. Jayapura sebesar 76,5%.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sumber penerimaan yang diberikan melalui otonomi khusus di Kabupaten Jayapura berpengaruh atau tidak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura sejalan dengan adanya pemberian Otonomi Khusus tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran variabel numerik dan analisis statistik. Studi ini akan menganalisis besarnya pengaruh Dana Otonomi Khusus, DAU dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura (Sugiyono, 2016:17) dengan analisis variabel menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan menggunakan metode pengumpulan data sekunder kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu; sampelnya berupa data Dana Otonomi Khusus, DAU, PAD dan PDRB di Kabupaten Jayapura periode 2015-2024. Sumber data berasal dari publikasi BPS, DJPK Kementerian Keuangan, BPKAD serta BAPPEDA Kabupaten Jayapura. Untuk memperkuat hasil penelitian, penulis akan melaksanakan wawancara dengan pihak pengelola Sumber penerimaan Otonomi Khusus sebagai interpretasi temuan penelitian yang akan melengkapi dan menjelaskan hasil pengolahan data.

Pengolahan data menggunakan aplikasi MS. Excel dan SPSS versi 27. Dari data-data yang digunakan dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji kelayakan objek sebagai variabel dan uji hipotesis untuk menyimpulkan hasil yang telah dianalisis.

Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jayapura dan penelitian dilaksanakan selama 4 bulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Uji ASumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik terdiri dari uji multikolinearitas, Uji Heteroskedisitas, Uji Normalitas dan Uji Autokorelasi.

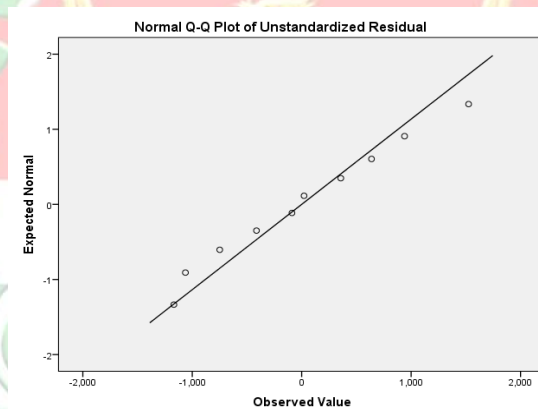
1. Uji Multikolinearitas

Tabel 1
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Colinearity statistic		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
X1	0.861	1.161	Tidak terdapat Multikolinearitas
X2	0.822	1.216	Tidak terdapat Multikolinearitas
X3	0.945	1.059	Tidak terdapat Multikolinearitas

2. Uji Normalitas

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan gambar diatas, diperoleh Q-Q Plot menunjukkan bahwa residual data penelitian menyebar di sepanjang garis diagonal, sehingga disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal. pengujian normalitas dapat dilihat menggunakan uji Kolmogorov Smirnov sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

Uji	D	p-value	Kesimpulan
Kolmogorov-Smirnov	0.102	0.200	Berdistribusi Normal

Berdasarkan table diatas, hasil uji yang diperoleh dari *p-value* adalah $0.200 > \alpha = 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Koefesien	T_{hitung}	$p-value$	Kesimpulan
X1	-2.258	-.761	.475	bersifat homoskedastisitas
X2	-4.187	-.839	.433	bersifat homoskedastisitas
X3	4.004	.995	.358	bersifat homoskedastisitas

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil nilai $p-value$ semua variabel independen lebih dari $\alpha = 0,05$ yang berarti variansi residual bersifat homoskedastisitas. Sehingga semua variabel independen dapat digunakan untuk analisis regresi.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 5
Tabel Uji Autokorelasi

Uji	d
Durbin-Watson	1.368

Berdasarkan hasil Uji autokorelasi diatas didapatkan nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1.368 akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 10 dan jumlah variable independen sebanyak 3 variabel. Diperoleh nilai $dL = 0,5253$ dan $dU = 2.0163$.

Oleh karena nilai d terletak diantara nilai dL dan dU , atau

$$dL < d < dU$$

$$0,5253 < 1.368 < 2.0163$$

maka pengujian tidak menyakinkan. Untuk itu akan digunakan uji lainnya dengan menggunakan uji Run Test

Tabel 6
Tabel Uji Run Test

Uji	$p - value$
Run Test	0.737

Berdasarkan hasil uji Run Test diatas, diperoleh nilai $p - value$ sebesar 0.737 lebih besar dari $\alpha = 0.05$, yang berarti data residual terjadi secara random (acak). Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

3.2 Hasil Uji Hipotesis

Uji Hipotesis terdiri dari Uji Simultan (F) , Uji Parsial (t) dan Uji Dterminasi (R^2)

1. Uji Simultan

Tabel 7
Hasil Uji Simultan

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>Regression</i>	10385993.066	3	3461997.689	6.495	.026 ^b
<i>Residual</i>	3198046.220	6	533007.703		
<i>Total</i>	13584039.286	9			

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada table diatas dengan menggunakan pengujian dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau nilai alpha yaitu 5% diperoleh nilai p-value $0.026 < 0.05$ yang artinya H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Koefisien determinasi

Tabel 8
Koefesien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.874 ^a	.765	.647	730.07377

Hasil nilai R^2 pada regresi linear berganda diperoleh sebesar 0.765 dimana variable pad, dau, dan otsus berpengaruh terhadap pdrb di kab. Jayapura sebesar 76.5%, sedangkan 23.5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

3. Uji Parsial Model Regresi Linear Berganda

Tabel 9
Hasil Uji Parsial

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 <i>(Constant)</i>	-10075.083	5769.684		-1.746	.131
otsus	9.469	5.923	.341	1.599	.161
pad	26.886	9.958	.590	2.700	.036
dau	23.584	8.036	.598	2.935	.026

Hasil uji parsial model regresi linear berganda variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap pdrb di kab. Jayapura dengan $\alpha = 5\%$ yaitu pad dengan p-value = $0.036 < \alpha = 5\%$, dan dau dengan nilai p-value = $0.026 < \alpha = 5\%$. Maka dapat disimpulkan bahwa pad dan dau berpengaruh secara signifikan terhadap pdrb di kab. Jayapura. Sedangkan otsus positif tidak signifikan terhadap pdrb di kab. Jayapura

3.3 Pembahasan

Berdasarkan hipotesis yang ada maka pembahasan terdiri dari beberapa poin sebagai berikut;

1. Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jayapura

Berdasarkan hasil Uji Regresi Linier, Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (Grossman & Krueger, 1995), Kebijakan penggunaan Dana Otonomi Khusus harus mempertimbangkan aspek lingkungan, karena pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan akan menciptakan biaya tersembunyi yang akhirnya menghambat pertumbuhan jangka panjang. Dana Otonomi Khusus yang merupakan instrumen khusus yang diberikan pada daerah Otonomi Khusus. Kabupaten Jayapura yang diberikan kewenangan otonomi khusus masih kurang maksimal memanfaatkan dana otsus meskipun telah melaksanakan berbagai program unggulan diatas. Hal ini mengindikasikan kurang tepatnya pelaksanaan desentralisasi terkhusus dalam pemanfaatan dana otsus. Dalam teori desentralisasi fiskal dikemukakan bahwa “desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan preferensi masyarakat lokal”. Namun, nyatanya pemerintah setempat masih kurang maksimal dalam memanfaatkan dana otsus sehingga dana otsus tersebut tidak berpengaruh signifikan maupun positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Sugawara & Nikaido, 2014).

“special autonomy of Papua province are identical to the characteristics of the asymmetric decentralisation model which has not yet led to success nor has yet shown the things that lead to better effectiveness”. Penelitian tersebut menunjukkan bahkan di Papua otonomi khusus masih belum berjalan dengan baik maka dalam hal ini regulasi sangat berperan penting dalam keberhasilan pemanfaatan dana otsus. Kurang maksimalnya pemanfaatannya dapat terjadi karena regulasi itu sendiri maupun pelaksanaannya yang kurang maksimal. Sehingga perlu dilakukannya evaluasi atas aturan dalam penggunaan dana otsus tersebut. Inovasi juga diperlukan dalam meningkatkan pengaruh dalam perencanaan program-program yang menggunakan dana otsus (Prabowo et al., 2021)

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jayapura

Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura. Menurut teori pertumbuhan ekonomi regional yang dikemukakan oleh (Glasson, 1992), pertumbuhan ekonomi daerah didefinisikan sebagai peningkatan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor endogen (dari dalam wilayah) dan faktor eksogen (dari luar wilayah). Adapun faktor dari dalam ialah tata pengelolaan usaha produksi dalam rangka peningkatan PAD yang dilakukan Pemda Kabupaten Jayapura. Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Namun dalam konteks desentralisasi fiskal, hubungan ini juga bisa terjadi sebaliknya, di mana peningkatan PAD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pembangunan (Prabowo et al., 2021). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi mencerminkan kekuatan ekonomi internal wilayah tersebut. Studi lintas negara menunjukkan bahwa daerah dengan sumber pendapatan internal yang kuat cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih

berkelanjutan (Barro, 1991). Berdasarkan hasil uji terbukti bahwa Pemda Kabupaten Jayapura mampu menipatkan PAD yang positif sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jayapura

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan ditemukan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura. Konvergensi ekonomi antar daerah dapat dipercepat melalui transfer fiskal seperti Dana Alokasi Umum (DAU), yang memungkinkan daerah tertinggal untuk mengejar ketertinggalan dengan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat (Mankiw et al., 1992). DAU merupakan sumber dana paling besar yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat dalam rangka menjalankan pemerintahan di daerah untuk pembangunan wilayah daerah tersebut. DAU digunakan Dalam perspektif Keynes belanja pemerintah (government expenditure) merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan pendapatan nasional. DAU yang dialokasikan ke suatu wilayah digunakan untuk pembiayaan belanja daerah, sehingga memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan teori ini terlihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jayapura sudah cukup baik dalam memanfaatkan DAU sebagaimana mestinya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga hasil uji yang ada menunjukkan DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Keynes, 1937).

4. Pengaruh Dana Otonomi Khusus, PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jayapura

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan ketiga variabel tersebut tidak bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura. Kebijakan Otonomi Khusus di Papua, termasuk di Kabupaten Jayapura, telah menciptakan peluang signifikan untuk pengembangan ekonomi lokal. Namun, implementasinya belum sepenuhnya mengatasi hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan akses terhadap modal (Prabowo et al., 2021). Tidak signifikannya pengaruh Dana Otsus, DAU, dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan fiskal daerah. Peningkatan kuantitas dana transfer dari pusat atau peningkatan PAD tidak serta merta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika tidak disertai dengan pengelolaan yang tepat dan terarah. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan. Akumulasi modal yang dihasilkan dari Dana Otonomi Khusus dan DAU akan mempengaruhi trajektori pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayapura. Alokasi dana untuk infrastruktur produktif dapat menciptakan efek pengganda yang lebih besar dibandingkan alokasi untuk belanja rutin (Swan, 1956). Disamping itu distribusi dan penggunaan Dana Otonomi Khusus, PAD, dan DAU di Kabupaten Jayapura tidak lepas dari dinamika politik lokal. Kualitas institusi dan tata kelola akan menentukan apakah sumber daya ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau justru menciptakan ketimpangan. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengelola dana tersebut dengan tepat agar berjalan sesuai tujuannya (Alesina & Rodrik, 1994).

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Bentuk dari Otonomi Khusus salah satunya berupa pemberian kekhususan pada desentralisasi fiskal atau kebebasan dalam pemanfaatan sumber penerimaan baik Dana Otsus, PAD dan DAU dalam mencapai keberhasilan pembangunan melalui inovasi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan optimal tergantung pada kemungkinan manipulasi pasar. Dalam memanfaatkan dana tersebut

diperlukan kebijakan yang optimal agar mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dengan maksimal agar mencapai pertumbuhan ekonomi (Acemoglu, 2012).

Adanya pemberian kekhususan ini berdasarkan hasil uji memberikan hasil sesuai teori pengeluaran atau hukum wagner maupun desentralisasi fiskal. Dimana PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura seperti temuan pada penelitian sebelumnya oleh Novita Anastasya Boky yang berjudul Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dimana PAD berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian lainnya oleh Jefri Alfin Sinaga, Elidawaty Purba, Pawan Darasa Panjaitan Universitas Simalungun Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun menunjukkan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Virgie Delawillia Kharisma, Palupi Lindiasari Samputra, Payiz Zawahir Muntaha. Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan manusia di Provinsi Papua yang menunjukkan bahwa dana otonomi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. sedangkan hasil uji berbeda dimana penelitian oleh Novita Anastasya Boky berjudul Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan Dana Otonomi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Y.

Secara garis besar Otonomi Khusus belum berhasil dijalankan dengan baik, terutama dalam hal pemanfaatan dana khusus yang diberikan berupa dana otonomi khusus. Hal ini menunjukkan kesamaan hasil dengan penelitian Prabowo, Dkk yang menunjukkan belum ada hasil yang maksimal melalui pelaksanaan Otonomi khusus.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua”**. Menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura karena pada uji simultan bersama-sama mendapatkan nilai $p\text{-value } 0,026 < 0,05$ sehingga setidaknya ada satu variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura. Namun dalam uji masing-masing X terhadap Y menunjukkan bahwa hanya PAD dan DAU yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura. Sedangkan Dana Otsus tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sumber penerimaan berupa dana Otonomi khusus masih belum dimanfaatkan dengan baik terutama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa waktu dan biaya penelitian serta dalam praktik ilmu pemerintahan diperlukan penjelasan yang lebih mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Dalam penelitian berikutnya penulis menyarankan agar penelitian berikutnya dilakukan penambahan variabel-variabel lain yang memiliki kemungkinan berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi serta menggunakan mix metode untuk dapat menjelaskan hasil dengan lebih maksimal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kabid BAPPEDA Kabupaten Jayapura beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, Dosen pembimbing, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D. (2012). Introduction to economic growth. *Journal of Economic Theory*, 147(2), 545–550. <https://doi.org/10.1016/j.jet.2012.01.023>
- Alesina, A., & Rodrik, D. (1994). Distributive Politics and Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(2), 465–490. <https://doi.org/10.2307/2118470>
- Barro, R. J. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407. <https://doi.org/10.2307/2937943>
- Boky, N. (2023). Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 658–664. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.16>
- BPS-Statistics Indonesia. (2023). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen), 2023. In *BPS-Statistics Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--maret-2023.html>
- Glasson, J. (1992). The Fall and Rise of Regional Planning in the Economically Advanced Nations. *Urban Studies*, 29(3–4), 505–531. <https://doi.org/10.1080/00420989220080551>
- Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1995). Economic Growth and the Environment. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(2), 353–377. <https://doi.org/10.2307/2118443>
- Keynes, J. M. (1937). The General Theory of Employment. *The Quarterly Journal of Economics*, 51(2), 209. <https://doi.org/10.2307/1882087>
- Kharisma, V. D., Samputra, P. L., & Muntaha, P. Z. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua. *Journal Publicuho*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11392>
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407–437. <https://doi.org/10.2307/2118477>
- Murdaya, J., & Syahril. (2022). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simeulue. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 245–254. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.293>
- Nurul Arbila, Yani Rizal, & Iskandar Iskandar. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Labuhan Batu. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 240–249. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.741>
- Panggabean, H. L., Hariani, D., & B, A. Y. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019. *Owner*, 6(2), 2200–2208. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.836>
- Prabowo, P. A., Supriyono, B., Noor, I., & Muluk, M. K. (2020). The influence of the special autonomy policy of the Papua Province on the welfare of its people. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(3), 203–223.
- Prabowo, P. A., Supriyono, B., Noor, I., & Muluk, M. K. (2021). Special autonomy policy evaluation to improve community welfare in Papua province Indonesia. *International Journal of Excellence in Government*, 2(1), 24–40. <https://doi.org/10.1108/IJEG-06-2019-0011>
- Rumbiak, W., & P. (2021). Twenty Years of Special Autonomy in Papua: Evaluating Economic Outcomes and Governance Challenges. *Journal of Southeast Asian Economies*, 3, 267–289.

<https://doi.org/10.1355/ae38-3d>

- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65. <https://doi.org/10.2307/1884513>
- Suaib. (2023). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. In *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Sugawara, E., & Nikaido, H. (2014). Properties of AdeABC and AdeIJK efflux systems of *Acinetobacter baumannii* compared with those of the AcrAB-TolC system of *Escherichia coli*. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 58(12), 7250–7257. <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>
- Sugiyono, M. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif, dan R&D Bandung: Alfabeta*.
- Swan, T. W. (1956). ECONOMIC GROWTH and CAPITAL ACCUMULATION. *Economic Record*, 32(2), 334–361. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434>
- Weingast, B. R. (2009). Second generation fiscal federalism: The implications of fiscal incentives. *Journal of Urban Economics*, 65(3), 279–293. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2008.12.005>

